

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi dan UKM (DISKOP UKM) Provinsi Sumatera Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah. DISKOP UKM Sumatera Barat dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Kantor DISKOP UKM Sumatera Barat berlokasi di Jalan Jl. Khatib Sulaiman No.11, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023, DISKOP UKM Sumatera Barat memiliki tugas membantu untuk Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DISKOP UKM Sumatera Barat mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, DISKOP UKM Sumatera Barat memiliki 29 staf yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, sub bagian tata usaha, sub bagian keuangan, bidang perizinan dan kelembagaan, bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, dan bidang pengawasan dan pemeriksaan. Salah satu fungsi yang diemban DISKOP UKM Sumatera Barat adalah penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Fungsi ini ditangani oleh bidang pengawasan dan pemeriksaan yang juga bertanggung jawab untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha

koperasi. Salah satu tugas bidang pengawasan dan pemeriksaan adalah mengkoordinasikan hasil dan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Koperasi memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi memberikan kontribusi sebesar 5,54% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2019 dengan volume usaha mencapai Rp154,72 triliun, jumlah asset Rp152,11 triliun, serta lebih dari 22 juta anggota yang terlibat (Wahyono & Purwanto, 2021). Hal ini membuktikan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi anggota, tetapi juga menggerakkan perekonomian nasional. Dengan perannya yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, integritas koperasi perlu dijaga melalui pembinaan dan pengawasan yang ketat.

Pengawasan koperasi yang dilakukan oleh DISKOP UKM Sumatera Barat menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan integritas koperasi sebagai entitas ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang kuat, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi dapat membantu dalam mencegah penyimpangan, kebijakan tidak sehat, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang sedang berjalan, tim pengawas koperasi melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Aspek kesehatan koperasi yang diperiksa yaitu tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Setelah dilakukan pengecekan, petugas pengawas koperasi akan memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan. Kemudian, koperasi diberi waktu selama 3 bulan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan koperasi tersebut. Selanjutnya, petugas pengawas koperasi kembali mengunjungi koperasi untuk melakukan pengecekan sejauh mana koperasi telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Namun, kunjungan kembali ini tentunya membutuhkan biaya dan seringkali masih ada koperasi yang tidak bersungguh-sungguh menindaklanjuti

rekomendasi sehingga masih terdapat perubahan yang tidak signifikan sebelum dan sesudah pemeriksaan koperasi.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, proses pengawasan yang sedang berjalan ini dinilai kurang efektif dan efisien. Berdasarkan analisis waktu, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menangani pengawasan satu koperasi sekitar 6 jam (diluar waktu tindak lanjut selama 3 bulan). Dengan waktu kerja efektif 12 jam per hari dan keterbatasan sumber daya manusia, tim pengawas hanya mampu menangani 2 pemeriksaan koperasi per hari. Sementara itu, terdapat 2.345 koperasi aktif di Sumatera Barat pada tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal, sehingga diperlukan perbaikan sistem agar proses pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan lebih efisien dan memenuhi target yang diharapkan.

Permasalahan serupa tentang kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pengawasan juga ditemukan dalam artikel yang diteliti oleh Ahadi & Gustina (2022). Artikel tersebut mengkaji proses pengawasan kontrak kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kab. Sarolangun yang mengalami kesulitan dalam memantau kontrak kerja. Proses pengawasan yang ada sangat bergantung pada Microsoft Excel dan WhatsApp untuk komunikasi, sehingga menimbulkan masalah seperti redudansi data, kesulitan dalam pemeriksaan data secara rutin, dan waktu pengambilan data yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, artikel ini menawarkan solusi berupa pembangunan sistem informasi. Menurut artikel ini, pembangunan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pengawasan dan memfasilitasi pelacakan kemajuan progres kinerja. Hal ini juga didukung oleh artikel lainnya yang diteliti oleh Taufik et al. (2023), Lestari & Setiyadi (2019), dan Warman & Jihadi (2019). Artikel-artikel pendukung ini juga membahas permasalahan serupa terkait kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pengawasan. Berdasarkan artikel-artikel pendukung ini, pembangunan sistem informasi dapat menyederhanakan proses pengawasan, mempercepat akses informasi kemajuan progres kinerja, meminimalkan resiko kehilangan data, mengurangi biaya operasional dan mempercepat pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa pembangunan sistem informasi, karena

sistem informasi dinilai relevan untuk meningkatkan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan DISKOP UKM Sumatera Barat.

Dari solusi yang ditawarkan yaitu pembangunan sistem informasi, terdapat beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang dapat dijadikan alternatif, yaitu metode Waterfall, Prototype, dan Rapid Application Development (RAD). Ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam artikel yang diteliti oleh Pricillia & Zulfachmi (2021). Menurut artikel tersebut, metode Waterfall memiliki kelebihan, yaitu mudah dikelola karena setiap fase memiliki tujuan yang jelas, lebih terstruktur, serta menyediakan dokumentasi yang lengkap. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang tidak pasti. Sementara itu, metode Prototype memiliki kelebihan dalam menangkap kebutuhan pengguna dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dan terjalinnya komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna. Namun, metode ini kurang cocok untuk proyek berskala besar dengan kebutuhan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan pengguna yang sangat intensif. Adapun metode RAD (Rapid Application Development) menawarkan penyelesaian yang lebih cepat melalui pengembangan paralel, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Namun, metode ini kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang tidak jelas, membutuhkan sumber daya yang besar, dan sering mengabaikan kualitas serta dokumentasi.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan permasalahan berupa kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta hasil tindak lanjut koperasi yang sering tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pengawasan dan pemeriksaan koperasi agar lebih efisien dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung upaya tersebut, metode Waterfall dipilih karena bersifat terstruktur, di mana setiap fasenya memiliki tujuan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan ini sangat relevan karena proses pembangunan sistem informasi dimulai dengan analisis mendalam terhadap akar permasalahan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang jelas dan spesifik. Setelah kebutuhan tersebut ditentukan, proses

berlanjut dengan perancangan solusi melalui diagram-diagram seperti diagram alur, yang memberikan panduan sistematis dalam pengembangan sistem. Selain itu, metode ini sangat ideal untuk proyek ini karena persyaratan sistem telah ditetapkan sejak awal secara jelas dan stabil, sehingga sejalan dengan pendekatan Waterfall, yang mengutamakan penyelesaian fase secara berurutan untuk memastikan solusi yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan secara optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi diatas maka dilakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul “Pembangunan Sistem Informasi *Monitoring* Tindak Lanjut Kesehatan Koperasi Berbasis Web Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat”. Sistem ini dikembangkan dengan metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall*. Sistem informasi yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemeriksaan koperasi, mempercepat akses informasi kemajuan progres tindak lanjut, serta hasil tindak lanjut koperasi yang menjadi lebih signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi *monitoring* tindak lanjut kesehatan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang efisien.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada tujuan utama yang ingin dicapai maka perlu diberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Pembangunan sistem informasi *monitoring* tindak lanjut kesehatan koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat hanya mencakup *monitoring* tindak lanjut kesehatan koperasi dan pemeriksaan koperasi.
2. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *waterfall*. Sistem informasi yang dibangun hanya akan sampai tahap *implementation & system testing*.
3. Sistem informasi yang dibangun menggunakan *framework* Laravel sebagai backend dan bootstrap sebagai frontend serta MySQL sebagai basis data.

4. Sistem informasi yang dibangun akan diuji dengan menggunakan metode *black box testing* dan *user acceptance testing* berdasarkan analisis kebutuhan dan perancangan sistem pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi berbasis web. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengefisienkan proses *monitoring* tindak lanjut kesehatan koperasi dan memudahkan pengawas dalam proses pengawasan sehingga lebih transparan dan dapat mengurangi beban kerja manual. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, baik koperasi, maupun staf Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat dari pembangunan sistem yang akan dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi proses pengawasan. Sistem ini akan membantu tim pengawas koperasi dalam menghemat waktu, khususnya untuk meminimalkan perjalanan lapangan, sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan dan evaluasi yang lebih mendalam.
2. Memperbaiki transparansi pengawasan. Dengan sistem berbasis web, seluruh proses pengawasan, mulai dari pemberian rekomendasi hingga tindak lanjut oleh koperasi, dapat terdokumentasi secara jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
3. Mengurangi beban kerja manual. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi, akan tergantikan dengan sistem otomatis, sehingga beban kerja staf dapat berkurang.
4. Mengoptimalkan sumber daya. Dengan efisiensi waktu dan pengelolaan data yang lebih baik, sistem ini memungkinkan tim pengawas untuk menangani lebih banyak koperasi tanpa harus meningkatkan jumlah staf atau jam kerja.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi atas 6 bab adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisikan profil organisasi, metode pengembangan sistem, dan landasan teori serta kajian literatur baik teori dasar maupun teori dan informasi pendukung yang digunakan dalam penelitian ini terkait pembangunan sistem informasi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan flowchart penelitian beserta penjabaran setiap tahapan yang terdapat dalam flowchart tersebut.

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi tentang pemodelan analisis sistem menggunakan *tools* seperti, *Business Process Model Notation* (BPMN), *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, perancangan basis data, struktur basis data dan tabel, dan perancangan antarmuka.

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang pengimplementasian aplikasi ke dalam bahasa pemrograman berdasarkan analisis dan perancangan, serta pengujian terhadap hasil implementasi sistem.

BAB VI: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran untuk pengembangan sistem kedepannya.